

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 2003-2017

MUHAMMAD MAULID



DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2017

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD MAULID
A11115510**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2017

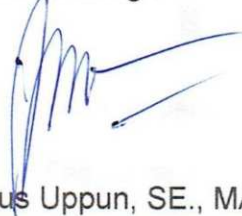
disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD MAULID
A11115510

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

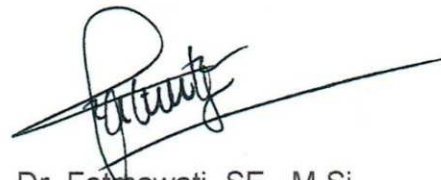
Makassar, 25 Juni 2019

Pembimbing I



Dr. Paulus Uppun, SE., MA.
NIP 19561231 196503 1 015

Pembimbing II



Dr. Fatmawati, SE., M.Si.
NIP 19640106 198803 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si.
NIP 19690413 199403 1 003



SKRIPSI

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2017

disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD MAULID
A11115510

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 09 Juli 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Paulus Uppun, SE., M.A.	Ketua	1..... 
2	Dr. Fatmawati, SE., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Madris, DPS., M. Si.	Anggota	3..... 
4	Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA.	Anggota	4.....
5	Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si.	Anggota	5..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si.
NIP 19690413 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Maulid

NIM : A11115510

Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2017

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 23 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Maulid



PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur hanya milik tuhan yang maha esa Allah SWT yang setiap saat melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Shalawat berbingkai salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, tauladan kita, tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW.

”Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. Alhamdulillah, ucapan yang paling pantas terucap atas segala pengetahuan, pengalaman serta ketetapan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis. Pada umumnya, bagian ini dijadikan sebagai tempat untuk mengungkapkan rasa terima kasih maupun curahan hati kepada berbagai pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Maka dari itu saya pun akan melakukan hal tersebut pada bagian ini.

Dengan penuh penghormatan, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan:

- Kepada Kedua orang tuaku, ayahanda tercinta Ahmad dan ibunda Dra. Hj. Jumalia atas kasih sayang, kerja keras, motivasi, nasihat, serta doanya sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya. Semoga surga yang menjadi balasan

segala yang telah diberikan.



- Kepada saudaraku, Alamsyah Achmad , Anna Amalia dan Aslia Setiawati. Atas kasih sayang, motivasi, nasihat, serta doanya sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya.
- Kepada dosen pembimbing dan penguji, Dr. Paulus Uppun, SE., M.A.; Dr. Fatmawati, SE., M.Si.; Dr. Madris, DPS., M.Si.; Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si, atas kritik, saran, motivasi, serta doanya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, rezeki, serta melancarkan segala urusan kalian.
- Kepada Penasehat Akademik peneliti, Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si, atas nasehat, doa, dan dampingannya dari awal hingga akhir studi peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, rezeki, serta melancarkan segala urusan.
- Kepada Keluarga Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HIMAJIE), atas pengalaman, jaringan, serta ruang yang diberikan bagi peneliti untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Terima kasih pula pada seluruh anggota kabinet segi enam, atas perjuangan serta rasa kekeluargaan yang kalian berikan selama satu periode kepengurusan. Semoga kedepannya HIMAJIE mampu menebarkan manfaat yang lebih banyak lagi.
- Kepada Kreativitas Seni Ekonomi (KRESEK), atas pengalaman, pembelajaran dan ruang yang diberikan sehingga peneliti mampu menyalurkan hobi, sehingga meraih prestasi di bidang seni musik.
- Kepada keluarga EKOWOWITS, atas pengalaman, kebersamaan, pembelajaran dan ruang yang diberikan sehingga peneliti mampu menyalurkan hobi.



- Kepada MELONKALIS, Fahri Pratama Putra, Alif Alfian, Bayu Nandar, Rafly Fawwaz, Muh Zulfadiyatma, atas kebersamaan selama bermusik , pelajaran dan prestasi yang telah di raih.
- Kepada seluruh rekan seperjuangan Antares 2015, rumah tempat kembali, atas jabatan seumur hidup, segala canda tawa dan cerita yang telah dibagi selama peneliti menjalani perkuliahan. Semoga kenangan masa kuliah yang tercipta menjadi alasan untuk terus saling menyatu dan kebersamai satu sama lain.
Krik Krik Ha!
- Kepada penuntun penulisan skripsiku, Muh. Abdi Shalihin, S.E.; Fitriana Ansyar, SE.; Muh. Fiqih Faisal, S.E. atas segala bantuan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, semoga diberi kesehatan, limpahan rezeki dan kemudahan atas segala urusan.
- Kepada Saudari, Andi Purnamasari yang memberikan motivasi, doa dan banyak memberikan bantuan dalam penulisan penelitian peneliti.
- Kepada pihak-pihak yang peneliti tidak sempat sebutkan, yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, tiada kata yang patut peneliti ucapkan selain doa, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dan senantiasa melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas amalan kita, dan menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga-Nya yang tertinggi. Aamiin ya Robbal'Alaamiin.

Makassar, 23 Juli 2019

Muhammad Maulid



ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2017
Analysis The Effect of Financial Inclusion on Income Inequality in Indonesia 2004-2017

Muhammad Maulid
Paulus Uppun
Fatmawati

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh investasi, UMP dan belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data yang digunakan yaitu data *time series* tahun 2003 sampai 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi, UMP dan belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB. Maka dari itu Investasi dari pihak swasta sebaiknya diarahkan pada industri padat karya sehingga banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Selain itu, pemerintah hendaknya mengarahkan kebijakan pengupahan agar mampu meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi serta dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah juga seharusnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah dalam penggunaan belanja modal dengan mengarahkan penggunaan belanja modal kepada industri yang berbasis padat karya agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal.

Kata Kunci: *Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB, Investasi, UMP, Belanja Pemerintah.*

This study aims to determine the effect of investment, UMP and government expenditure on employment in the manufacturing sector both directly and indirectly through RGDP in South Sulawesi Province from 2003-2017. This study uses secondary data obtained from the Badan Pusat Statistik (BPS). The data used is time series data from 2003 to 2017 in South Sulawesi Province. The results of the study show that investment, UMP and government expenditure do not have a significant effect on employment, both directly and indirectly through RGDP. Therefore, investment from the private sector should be directed at labor intensive industries so many workers can be absorbed. In addition, the government should direct wage policies so as to be able to increase labor productivity and production and can increase the income and welfare of workers. The government should improve the efficiency and effectiveness of government spending in the use of expenditure by directing the use of capital expenditures to labor-based so that employment can be more optimal.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teoritis.....	9
2.1.1 Definisi Industri.....	9
2.1.2 Industrialisasi	10
2.1.3 Klasifikasi Industri.....	11
2.1.4 Teori Tenaga Kerja.....	12
2.1.5 Konsep PDRB	15
2.1.6 Teori Investasi.....	16
2.1.7 Teori Upah	18
2.1.8 Teori Belanja Pemerintah	20
2.1.9 Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	21
2.1.10 Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	23



2.1.11 Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	24
2.1.12 Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	26
2.1.13 Pengaruh Investasi Terhadap PDRB.....	27
2.1.14 Pengaruh Upah Terhadap PDRB	28
2.1.15 Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap PDRB	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Konseptual	31
2.4 Hipotesis Penelitian.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	34
3.2 Jenis dan Sumber Data	34
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.4 Metode Analisa Data	35
3.5 Definisi Operasional	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Variabel.....	38
4.1.1 Perkembangan Variabel PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan	38
4.1.2 Perkembangan Variabel Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan	41
4.1.3 Perkembangan Variabel Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan.....	43
4.1.4 Perkembangan Variabel UMP di Provinsi Sulawesi Selatan	46
4.1.5 Perkembangan Variabel Belanja Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan	47
4.2 Hasil Estimasi Struktural Variabel	48
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
4.3.1 Analisis dan Implikasi Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	53
4.3.2 Analisis dan Implikasi Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	54
4.3.3 Analisis dan Implikasi Pengaruh UMP Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	56
3.4 Analisis dan Implikasi Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	57



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 59

5.2 Saran 59

DAFTAR PUSTAKA..... 61

LAMPIRAN 66



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2017	4
1.2	Struktur Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010-2017	5
2.1	Klasifikasi Industri Menurut Banyaknya Tenaga Kerja.....	11
4.1	PDRB Sektor Industri	38
4.2	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan.....	41
4.3	Investasi Sektor Industri Pengolahan	44
4.4	Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan	46
4.5	Belanja Pemerintah Sektor Industri Pengolahan	47
4.6	Hasil Estimasi Fungsi PDRB(Y_1) dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2)	48
4.7	Besaran Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Pengaruh.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	32
4.1	Hasil Estimasi	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	<i>Data yang Digunakan</i>	66
2	Output Regresi Menggunakan Aplikasi AMOS 23	71
3	Uji Multikolinearitas	79
4	Biodata.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Tenaga kerja sebagai salah satu dari faktor produksi merupakan unsur yang penting dan paling berpengaruh dalam mengelola dan mengendalikan sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi maupun investasi. Keterlibatannya dalam proses produksi menyebabkan mereka menginginkan pendapatan yang memadai, tingkat keamanan dan kenyamanan kerja, serta keuntungan lain yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Dimana manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, dan juga merupakan konsumen hasil pembangunan itu sendiri.

Dalam teori klasik menganggap bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah tidak akan ada artinya jika tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengolahnya. Dan dalam hal ini teori klasik Adam Smith, juga menyatakan bahwa alokasi sumber daya manusia yang bersifat efektif adalah pemula pembangunan ekonomi. Jika sumber daya manusia dapat bersifat efektif maka akan mampu memberikan sumbangsi terhadap pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia adalah faktor utama dalam pembangunan.



Melonjaknya pertumbuhan penduduk suatu wilayah yang diiringi dengan penambahan angkatan kerja telah menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena belum berfungsinya semua sektor kehidupan masyarakat dengan baik serta belum meratanya pembangunan di segala bidang sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan dinamis. Adanya berbagai sektor tidak mampu memenuhi dan menyerap angkatan kerja yang terus meningkat secara maksimal yang disebabkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat dan lapangan kerja yang tersedia. Dalam masalah penyerapan tenaga kerja akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Sektor industri pengolahan digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena dilihat mampu menyerap sebagian besar jumlah penduduknya dalam kegiatan yang dilakukan pada sektor industri pengolahan walaupun hasilnya belum memuaskan.

Pentingnya peranan industri pengolahan dalam proses pembangunan ekonomi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan kondisi pembangunan ekonomi. Setiap jenis industri pasti mengharapkan bisa menghasilkan keuntungan, baik itu industri besar maupun industri kecil. Tingkat keuntungan suatu industri merupakan pencerminan keberhasilan suatu industri tersebut akan mampu memenuhi kewajibannya dan lebih berpotensi berkembang. Perkembangan suatu industri sebagian besar di pengaruhi tenaga kerjanya, semakin baik produktivitas tenaga kerja, semakin banyak hasil produksinya. Setiap wilayah seperti Provinsi

Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunannya mengharapkan



pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.

Salah satu cara untuk memperluas kesempatan kerja adalah melalui pengembangan industri terutama industri yang bersifat padat karya. Perkembangan dapat terwujud melalui investasi swasta maupun pemerintah. Maka dengan adanya investasi yang nantinya memberikan atau menciptakan peluang bagi pelaku ekonomi untuk memperluas usaha atau lapangan kerja sehingga menyebabkan kapasitas produksi meningkat dan menciptakan kesempatan kerja. Selain investasi swasta terdapat investasi pemerintah yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Provinsi Sulawesi Selatan meletakkan sektor industri pengolahan sebagai sektor unggul (leading sector) pada strategi pembangunan ekonomi, karena dengan adanya sektor industri pengolahan ini dapat membantu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Proses pembangunan sering kali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain pembangunan industri merupakan satu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut maka peran sektor industri semakin penting, sehingga sektor industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin atau Leading Sektor, peranan sektor industri dalam perekonomian suatu wilayah terlihat dalam kontribusi

bangan sektor industri.



Adapun kontribusi sektor dilihat pada struktur perekonomian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Struktur Perkeekonomian Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010–2017

PDRB Lapangan Usaha (54 Kategori)	PDRB Lapangan Usaha ADHK (67)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,06	22,79	21,89	21,35	21,84	21,57	21,66	21,28
B. Pertambangan dan Penggalian	7,20	6,41	6,20	6,09	6,29	6,30	5,94	5,79
C. Industri Pengolahan	13,74	13,86	13,83	14,04	14,23	14,17	14,28	13,99
D. Pengadaan Listrik, Gas	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,09
E. Pengadaan Air	0,14	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12
F. Konstruksi	11,67	11,54	11,64	11,96	11,82	11,95	11,87	12,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,28	13,55	13,93	13,87	13,83	13,92	14,24	14,70
H. Transportasi dan Pergudangan	3,61	3,77	3,93	3,89	3,66	3,65	3,66	3,70
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,33	1,34	1,37	1,36	1,36	1,34	1,36	1,41
J. Informasi dan Komunikasi	5,21	5,39	5,97	6,33	6,22	6,26	6,31	6,50
K. Jasa Keuangan	2,94	3,25	3,46	3,50	3,45	3,45	3,65	3,56
L. Real Estate	3,45	3,55	3,60	3,65	3,66	3,67	3,63	3,54
M,N. Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,34	5,26	4,94	4,73	4,50	4,53	4,21	4,13
P. Jasa Pendidikan	5,43	5,54	5,47	5,48	5,33	5,33	5,31	5,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,79	1,81	1,84	1,85	1,89	1,93	1,95	1,98
R, S, T, U. Jasa lainnya	1,29	1,27	1,26	1,26	1,26	1,28	1,31	1,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Terlihat kontribusi sektor Industri pengolahan cukup besar yaitu sebesar 13,99% lebih kecil dari sektor pertanian,kehutanan dan perikanan sebesar 21,28% dan sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,70%. Maka dari itu peran sektor industry pengolahan penting untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dalam menyerap tenaga kerja.

Sejalan dengan hal tersebut maka peran sektor industri semakin penting, sektor industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin atau Leading



Sektor, peranan sektor industri dalam perekonomian suatu wilayah terlihat dalam kontribusi atau sumbangan sektor industri.

Sektor industri pengolahan ini diharapkan mampu meningkatkan PDRB dan dapat menyerap tenaga kerja. Di Provinsi Sulawesi Selatan dan diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya sektor industri pengolahan ini maka dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang sedang mencari kerja. Adapun struktur tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Struktur Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan periode 2010–2017.

TAHUN	Pertanian, Kehutanan, Perburuan Perikanan	Industri Pengolahan	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel/	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Lainnya	Total
2010	48	6	18	15	12	100
2011	44	7	19	17	13	100
2012	44	7	18	17	14	100
2013	43	6	18	18	14	100
2014	42	6	19	20	13	100
2015	42	7	20	18	14	100
2016	40	8	21	17	15	100
2017	39	7	21	18	15	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dapat dilihat pada table diatas bahwa peran sektor industri pengolahan dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 7% di tahun 2017 tidak begitu besar

sebesar 39% di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor industry pengolahan dalam



menyerap tenaga kerja masih minim walau kontribusi sektor industry pengolahan ini cukup besar.

Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu investasi, UMP dan belanja pemerintah. Investasi memegang peranan penting pada sektor industri pengolahan bagaimanapun juga investasi akan menimbulkan peluang bagi pelaku ekonomi untuk memperluas usahanya serta memperbaiki sarana-sarana produksi, sehingga dapat meningkatkan output yang nantinya dapat memperluas kesempatan kerja yang lebih banyak dan keuntungan yang lebih besar dan kemudian dana yang didapat diputar lagi untuk investasi dan diharapkan dengan adanya kenaikan yang berkelanjutan dari usaha tersebut sehingga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang akan semakin meningkat.

Upah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja, teori upah menjelaskan bahwa upah ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi industri. Berdasarkan teorinya, upah yang tinggi akan membuat biaya produksi industri juga meningkat. Akibatnya, harga suatu produk juga meningkat, hal ini menurunkan jumlah permintaan menurun yang nantinya menurunkan jumlah permintaan tenaga kerja.

Belanja pemerintah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja karena jumlah penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Belanja pemerintah merupakan dana yang digunakan untuk

produk berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk membeli menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total



belanja pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – provinsi – daerah). Sehingga jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah akan memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan. Semakin besar keputusan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah maka akan mempengaruhi jumlah output yang akan dihasilkan oleh sektor industri.

Berdasarkan pada kenyataan yang telah dijelaskan diatas maka menarik untuk mengamati masalah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Judul penelitian yang akan diangkat yaitu **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2003-2017”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2017?
2. Apakah UMP berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2017?
3. Apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDBR di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003- 2017?



1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2017.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2017.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003- 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Berguna sebagai salah satu informasi dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut di atas yang secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan secara tidak langsung terhadap PDRB pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat dijadikan salah satu referensi bagi para peneliti yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Definisi Industri

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu.

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu *industria* yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi industri menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok.

Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang berguna. Secara umum pengertian industri adalah suatu usaha atau



kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Dalam pengertian yang sempit, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

2.1.2 Industrialisasi

Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sector, maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya.

Berdasarkan pengalaman di sebagian besar negara, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun.



2.1.3 Klasifikasi Industri

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu :

Tabel 2.1 Klasifikasi Industri menurut Banyaknya Tenaga Kerja

NO.	Klasifikasi Industri	Jumlah tenaga kerja (orang)
1.	Industri Besar	100 keatas
2.	Industri Sedang	20-99
3.	Industri Kecil	5-19
4.	Industri Rumah Tangga	1-4

Sumber : BPS

Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu perusahaan industri menghasilkan 2 jenis komoditi atau lebih dengan nilai yang sama maka produksi utama adalah komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar.

Golongan Pokok

1. Makanan
2. Minuman
3. Pengolahan tembakau
4. Tekstil
5. Pakaian jadi
6. Kulit, barang dari kulit dan alas kaki



7. Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
8. Kertas dan barang dari kertas
9. Pencetakan dan reproduksi media rekaman
10. Produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi
11. Bahan kimia dan barang dari bahan kimia
12. Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
13. Karet, barang dari karet dan plastik
14. Barang galian bukan logam
15. Logam dasar
16. Barang logam, bukan mesin dan peralatannya
17. Komputer, barang elektronik dan dan optik
18. Peralatan listrik
19. Mesin dan perlengkapan
20. Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer
21. Alat angkutan lainnya
22. Furnitur
23. Pengolahan lainnya
24. Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

2.1.4 Teori Tenaga Kerja

Badan Pusat Statistik mendefinisikan bekerja adalah melakukan pekerjaan dimaksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau an dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus



dalam seminggu yang lalu (maksudnya seminggu sebelum pencacahan). Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (workingage population). Sedangkan menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya demografi. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat pula mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur didalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut, supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda, sehingga batasan usia kerja antar negara menjadi tidak sama

usia, batas umur minimal untuk tenaga kerja yaitu 15 tahun tanpa batas



Menurut Handoko (1985) penyerapan tenaga kerja sebagai jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Terjadinya penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.

Menurut Kuncoro (2003), penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi oleh banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Dalam dunia usaha tidak memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanya pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal.

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha.

Dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal.



Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non upah.

2.1.5 Konsep PDRB

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral atau lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2010), didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga konstan menurut BPS adalah jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya. PDRB atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) sampai akhir tahun 1960, ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan



ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggitingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan pada negara yang sedang berkembang sering mengalami dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

2.1.6 Teori Investasi

Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi penambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan

mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi juga untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga



kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Sedangkan, Dombush & Fisher berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa mendatang.

Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. Dan persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "capital formation" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber

fungsi penting dari kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu
n dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan



meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Investasi pada aset-aset finansial (financial assets) yaitu investasi yang dilakukan di pasar uang misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang dan lain-lain.
2. Investasi pada asset-asset rill (real assets) yaitu investasi yang dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham dan lain-lain. Investasi pada asset-asset rill ini dapat berbentuk pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.

2.1.7 Teori Upah

Menurut Sadono Sukirno (2002) upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya. Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

nya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang
 jadinya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi.



Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi.

2. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin - mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (substitution effect).

Upah merupakan balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Masih menurut Gilarso, upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan atau buruh).



2.1.8 Teori Belanja Pemerintah

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi di mana penerimaan sama dengan pengeluaran ($G = T$). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan ($G < T$). Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan ($G > T$). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya.

Belanja pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – propinsi – daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Argumentasi mengenai kebijakan publik dalam kaitan dengan kebijakan belanja pemerintah didasarkan pada situasi bahwa pasar tidak bisa berperan sendiri

efkan mobilisasi aktivitas ekonomi terutama untuk mencapai efisiensi.

pemerintah juga merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai



pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus dilokasikan secara efektif untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Belanja pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

2.1.9 Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: a) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. b) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. c) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja menurut Harrod-Domar investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga besar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal



mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya belanja pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya investasi di daerah. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Investasi merupakan salah satu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi. Untuk keperluan tersebut maka dibangun pabrik-pabrik, perkantoran, alat-alat produksi dan infrastruktur yang dibiayai melalui investasi baik berasal dari pemerintah maupun swasta.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Harrod Domar, bahwa kenaikan tingkat output dan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan. Investasi meningkatkan output perekonomian dan dapat menghasilkan input. Oleh karena adanya investasi-investasi baru maka memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja baru

dan menyerap tenaga kerja yang berkompeten dan berkualitas. Salah satu yang mendorong salah satunya adalah tenaga kerja, tenaga kerja merupakan



faktor pendorong penting dalam pertumbuhan perekonomian. Karena adanya investasi maka akan meningkatkan kesempatan kerja.

2.1.10 Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan. Dengan demikian pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan di setiap perusahaan. Pekerja dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, para pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di lain pihak, pengusaha melihat upah sebagai bagian dari biaya produksi, sehingga pengusaha biasanya sangat hati-hati untuk meningkatkan upah. Menurut Todaro, yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja hal ini akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Kenaikan tingkat upah mempengaruhi penyediaan tenaga kerja melalui dua daya yang saling berlawanan. Kenaikan tingkat upah di satu pihak meningkatkan pendapatan (income effect) yang cenderung untuk mengurangi tenaga kerja. Di pihak lain peningkatan upah membuat waktu senggang (substitution effect). Daya substitusi ini akan meningkatkan jumlah tenaga kerja tetapi setelah mencapai titik tertentu.

Besar kecilnya upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi meningkatkan harga produk yang pada membuat permintaan terhadap produk berkurang. Kondisi ini memaksa



produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi permintaan tenaga kerja. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat perubahan skala produksi disebut efek skala produksi (scale effect). Suatu kenaikan upah dengan asumsi harga barang-barang modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek substitusi (substitution effect). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat upah mempunyai hubungan yang negatif dengan penyerapan tenaga kerja.

2.1.11 Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Peranan pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari semakin besarnya belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi telekomunikasi, transportasi, persediaan air yang merupakan kontribusi utama belanja pemerintah yang efisien untuk merangsang investasi sektor swasta. Hubungan pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan dengan kesempatan kerja dalam hal ini dilihat dari sisi usaha meningkatkan investasi swasta berperan secara efektif. Terkait dengan itu, pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan yang mendorong investasi swasta dapat menciptakan lapangan usaha yang nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Belanja pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. belanja pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan



ketepatan arah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi belum dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan pendapatan tetap akan terjadi dan cenderung meningkat. Dengan demikian analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja.

Teori Keynes, menyatakan bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan misalkan apabila perekonomian sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan sepenuhnya diatur oleh kegiatan sektor saja, maka perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi, fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja, pengangguran dan tingkat harga.

Belanja pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dalam teori Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar

semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga besar.



2.1.12 Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Sukirno, 2007).

Terjadinya pertumbuhan ekonomi akan menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga dari sisi produksi akan memerlukan tenaga kerja produksi. Suatu pandangan umum menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi (growth) berkorelasi positif dengan tingkat penyerapan tenaga kerja (employment rate). Berpijak dari teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Solow tentang fungsi produksi agregat menyatakan bahwa output nasional (sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi disimbolkan dengan Y) merupakan fungsi dari modal (K) fisik, tenaga kerja (L) dan kemajuan teknologi yang dicapai (A). Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi), dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif tingkat penyerapan tenaga kerja (Todaro, 2000).



2.1.13 Pengaruh Investasi Terhadap PDRB

Menurut teori Keynes, kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan, dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang kemudian menyebabkan kenaikan pada pendapatan dan pekerjaan. Tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru, sehingga tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat meningkat, dan akhirnya akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Harrod-Domar (dalam Jinghan, 2000), menyatakan bahwa kegiatan investasi akan menimbulkan dua efek, yaitu efek langsung terhadap pengeluaran agregat dan efek terhadap kapasitas produksi. Efek langsung dari pengeluaran investasi terjadi pada sisi permintaan agregat bila pengeluaran investasi meningkat, yang kemudian akan meningkatkan pendapatan nasional atau daerah melalui proses multiplier. Efek terhadap kapasitas produksi terjadi pada sisi penawaran agregat yang bersifat jangka panjang, di mana kenaikan pengeluaran investasi akan menaikkan jumlah modal. Dengan jumlah modal yang meningkat, kapasitas produksi perekonomian akan meningkat yang kemudian juga akan meningkatkan penawaran agregat.

Oleh karena itu, usaha-usaha untuk meningkatkan investasi perlu digalakkan, melalui penyertaan modalnya dan melalui penciptaan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi peningkatan investasi.



2.1.14 Pengaruh Upah Terhadap PDRB

Upah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan, semakin tinggi upah, semakin kecil permintaan akan tenaga kerja karena upah merupakan biaya bagi suatu perusahaan. Sebaliknya, dari sisi penawaran, semakin tinggi upah, semakin banyak orang yang ingin bekerja. Semakin banyak tenaga kerja yang bekerja, semakin banyak output yang dihasilkan. Output yang tinggi akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan PDRB.

Oleh karena itu, kebijakan mengenai upah mempunyai dua sisi yang jika salah satu sisi tidak diperhatikan akan merugikan. Studi Waisgrais (2003) menemukan bahwa kebijakan upah minimum menghasilkan efek positif dalam hal mengurangi kesenjangan upah yang terjadi pasar tenaga kerja. Studi Askenazy (2003) juga menunjukkan bahwa upah minimum memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal manusia.

2.1.15 Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap PDRB

Rostow (Mangkoesubroto, 2001) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah pada tahap awal pembangunan ekonomi memiliki rasio yang besar terhadap pendapatan nasional. Pada tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Selanjutnya pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap dilakukan guna memacu pertumbuhan ekonomi agar dapat lepas landas.

Selanjutnya, Wahyuni (2014) berpendapat bahwa peran pemerintah sangat

penting dalam mengatur ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah menetapkan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan



pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pratomo (2011), mengkaji tentang Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Surakarta Tahun 2000-2008. Berdasarkan hasil penelitiannya maka didapat hasil bahwa secara simultan investasi, belanja pemerintah dan ekspor berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja begitu pula secara parsial investasi, belanja pemerintah dan ekspor berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Zamrowi (2007). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil (Studi di Industri Kecil Mebel di Kota Semarang). Metode Analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel upah berhubungan negatif dan signifikan, variabel produktivitas berhubungan negatif dan signifikan, variabel modal berpengaruh positif dan signifikan, variabel pengeluaran non upah berhubungan positif dan signifikan.

Ahmad Yani (2011), dalam skripsinya mengenai Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan Periode 2000-2009 dengan menggunakan model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil regresi, investasi asing berpengaruh positif signifikan di mana hal ini sesuai dengan model multiplier Keynes yang menyebutkan bahwa peningkatan jumlah investasi swasta akan

luas output dan penggunaan tenaga kerja. Sedangkan dari hasil regresi investasi dalam negeri sendiri berpengaruh negatif. Ini terjadi karena



kebanyakan industri merupakan industri padat modal bukannya padat karya, selain itu investasi dalam negeri khususnya bersumber dari pemerintah lebih terorientasi pada pembangunan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja.

Muhammad Findi Alexandi dan Ovilla Marshafeni (2013) mengkaji tentang Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian dan Sektor Jasa Pasca Kebijakan Upah Minimum di Provinsi Banten (Periode Tahun 2001- 2011). Hasil Estimasi model sektor pertanian menunjukkan bahwa variabel UMK, Konsumsi, Investasi, dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Variabel konsumsi dan PDRB memiliki hubungan yang positif. Hasil estimasi model sektor jasa menunjukkan bahwa variabel UMK, Konsumsi, Investasi, dan PDRB memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Variabelvariabel tersebut memiliki hubungan positif dengan penyerapan tenaga kerja di sektor jasa.

Jumriadi (2010), dalam skripsinya mengenai Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Upah, dan pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan Periode 1999-2008 dengan menggunakan model regresi berganda dan linear menemukan bahwa, berdasarkan hasil perhitungan tingkat upah berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0299 serta tingkat standar signifikansi 5% ($\alpha = 0.05$). Nilai koefisien regresi tingkat upah mempunyai hubungan negatif terhadap variabel penyerapan tenaga kerja dengan nilai koefisien -0.308844 . Ini berarti bahwa setiap kenaikan tingkat upah sebesar 1% akan mengurangi penyerapan tenaga kerja sebesar 0,30% dengan asumsi variabel-

lain tetap atau konstan.



Penelitian yang telah dilakukan oleh ke lima peneliti telah memaparkan faktor-faktor yang apa saja yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitian ini penulis akan menggabungkan beberapa yang telah dilakukan sebelumnya yang akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana, pada penelitian ini akan diambil beberapa variabel yang telah diteliti kemudian menggabungkan menjadi satu penelitian yang berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

2.3 Kerangka Konseptual

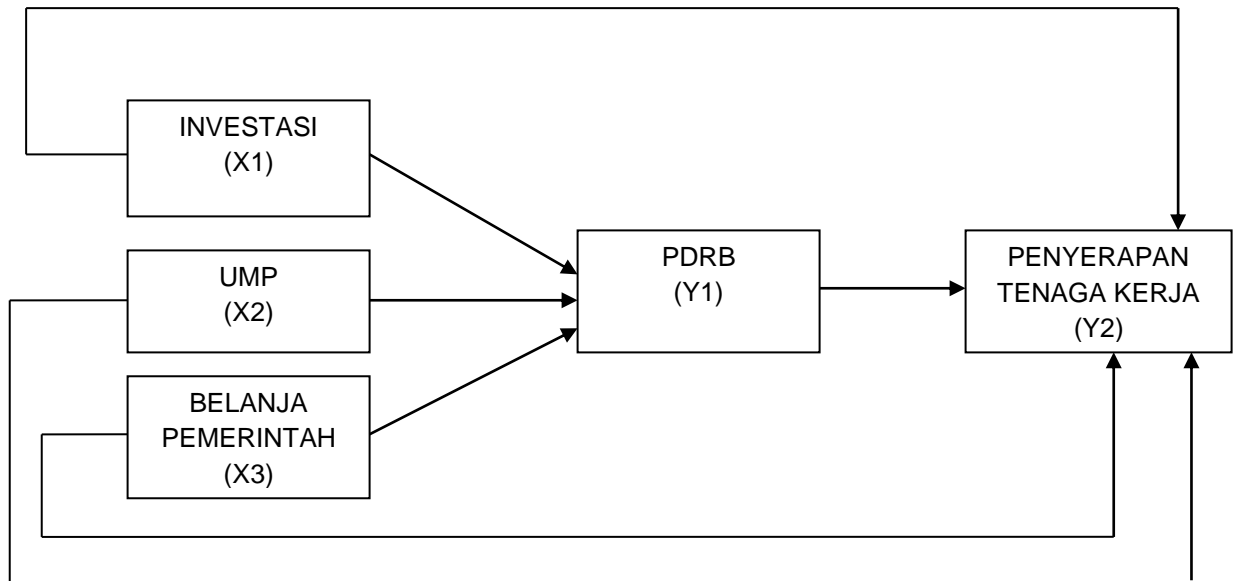
Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa variabel investasi(X_1), UMP(X_2) dan belanja pemerintah(X_3) sedangkan PDRB (Y_1) Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2) yang objek penelitiannya yaitu pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Variabel investasi dianggap mempengaruhi produktivitas sehingga meningkatkan PDRB dan jumlah tenaga kerja yang diserap pada suatu sektor industri pengolahan karena investasi mempunyai peranan penting bagi setiap usaha karena bagaimanapun juga investasi akan menimbulkan peluang bagi pelaku ekonomi untuk memperluas usahanya serta memperbaiki sarana-sarana produksi, sehingga dapat meningkatkan output yang nantinya dapat memperluas kesempatan kerja. Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan variabel yang dianggap mempengaruhi produktivitas sektor industri pengolahan dan tingkat penyerapan tenaga kerja, karena tingkat upah akan memberikan dampak terhadap hasil atau produktivitas setiap industri dan juga mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Variabel

pemerintah menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja karena belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap penyerapan



tenaga kerja. Jika belanja pemerintah dapat diefisienkan maka ini dapat memacu /dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja dan mempengaruhi produktivitas yang nantinya dapat meningkatkan PDRB. Dan Untuk lebih jelasnya pengaruh antara variabel X dan Y dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pikir penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa Investasi (X1), UMP (X2), dan Belanja Pemerintah (X3) melalui PDRB (Y1) dan atau secara langsung akan mempengaruhi besar kecilnya Penyerapan Tenaga Kerja (Y2). Perubahan yang terjadi baik pada Investasi, UMP, dan Belanja Pemerintah akan mengakibatkan perubahan pada Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor industri pengolahan di Sulawesi Selatan.



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu proporsi yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Berdasarkan teori ekonomi dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Diduga investasi secara langsung dan tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003- 2017.
2. Diduga UMP berpengaruh negative secara langsung dan tidak langsung dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003- 2017
3. Diduga belanja pemerintah berpengaruh positif secara langsung dan tidak langsung dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2017.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan di provinsi Sulawesi Selatan dengan variabel terikat adalah penyerapan tenaga kerja, variabel antara adalah PDRB, dan variabel yang mempengaruhi adalah Investasi, UMP, dan Belanja Pemerintah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Sulawesi Selatan dan sumber-sumber terkait dalam kurun waktu 2003-2017.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel.



3.4 Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesa adalah model analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi yang digunakan untuk menerangkan akibat langsung, akibat tidak langsung dan akibat total seperangkat variabel sebagai variabel penyebab terhadap seperangkat variabel lain yang merupakan variabel akibat. Analisis jalur dapat menerangkan hubungan antara satu atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen. Masing-masing variabel independen dan dependen dapat berbentuk faktor atau konstruk yang dibangun dari beberapa variabel indikator ataupun dapat berbentuk tunggal. Secara ekonometrika model

Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = F(X_1, X_2, X_3) \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = F(Y_1, X_1, X_2, X_3) \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

Y_2 = Penyerapan Tenaga Kerja (orang)

Y_1 = PDRB

X_1 = Investasi

X_2 = UMP

X_3 = Belanja Pemerintah

Dari fungsi (1) dan (2) diatas jika diandaikan dalam fungsi *Cobb-Douglas* (non-linear), maka model yang dikembangkan sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha_1 X_1^{\alpha_1} X_2^{\alpha_2} X_3^{\alpha_3} \mu_1 \dots \dots \dots (3)$$

$$Y_2 = \beta_1 Y_1^{\beta_1} X_1^{\beta_2} X_2^{\beta_3} X_3^{\beta_4} \mu_2 \dots \dots \dots (4)$$



Kemudian dari persamaan (3) dan (4) diatas dapat di transformasikan menjadi linear dalam bentuk logaritma natural (Ln) sebagai berikut :

$$\text{Ln } Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ Ln } X_1 + \alpha_2 \text{ Ln } X_2 + \alpha_3 \text{ Ln } X_3 + \mu_1 \dots \dots \dots (5)$$

$$\text{Ln } Y_2 = \beta_0 + \beta_1 \text{ Ln } Y_1 + \beta_2 \text{ Ln } X_1 + \beta_3 \text{ Ln } X_2 + \beta_4 \text{ Ln } X_3 + \mu_2 \dots \dots \dots (6)$$

Dimana:

α_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien Investasi

β_2 = Koefisien UMP

β_3 = Koefisien Belanja Pemerintah

μ = Error Term

Substitusi persamaan (5) ke dalam persamaan (6) sebagai berikut :

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 (\alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \mu_1) + \beta_2 X_1 + \beta_3 X_2 + \beta_4 X_3 + \mu_2$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 \alpha_0 + \beta_1 \alpha_1 X_1 + \beta_1 \alpha_2 X_2 + \beta_1 \alpha_3 X_3 + \beta_1 \mu_1 + \beta_2 X_1 + \beta_3 X_2 + \beta_4 X_3 + \mu_2$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 \alpha_0 + \beta_1 \alpha_1 X_1 + \beta_2 X_1 + \beta_1 \alpha_2 X_2 + \beta_3 X_2 + \beta_1 \alpha_3 X_3 + \beta_4 X_3 + \beta_1 \mu_1 + \mu_2$$

$$Y_2 = \gamma_0 + \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \gamma_3 X_3 + \mu_{12} \dots \dots \dots (7)$$

Dimana :

$\gamma_0 = \beta_0 + \beta_1 \alpha_0$ adalah total konstanta.

$\gamma_1 = \beta_1 \alpha_1 + \beta_2$ adalah pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB.

$\gamma_2 = \beta_1 \alpha_2 + \beta_3$ adalah pengaruh UMR terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB.

$\gamma_3 = \beta_1 \alpha_3 + \beta_4$ adalah pengaruh UMR terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB.

$\mu_1 + \mu_2$ adalah *composite random error*



3.5 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Y) dan tiga variabel independen (X). Adapun definisi operasional masing-masing variable sebagai berikut:

- a. Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2) adalah jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2017 yang dinyatakan dalam orang.
- b. PDRB (Y_1) adalah produksi barang-barang dan jasa-jasa menurut sektor kegiatan ekonomi industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan harga konstan tahun 2010 yang dinyatakan dalam rupiah.
- c. Investasi (X_1) adalah sejumlah dana yang diinvestasikan (PMA dan PMDN) pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2017 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp)
- d. UMP (X_2) adalah upah minimum provinsi yang diberikan kepada tenaga kerja yang berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2017 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).
- e. Belanja Pemerintah (X_3) adalah belanja pemerintah berupa belanja modal dalam rangka penyelenggaraan sektor industri pengolahan dalam menyerap tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003-2017 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Variabel Penelitian

Sub bab ini terdiri atas gambaran umum perkembangan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 15 tahun terakhir.

4.1.1. Perkembangan Variabel PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4.1 PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2017

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan
2003	Rp. 15.414.955.874.762	-
2004	Rp. 16.372.579.211.901	6,21%
2005	Rp. 17.567.125.757.966	7,30%
2006	Rp. 18.835.343.567.256	7,22%
2007	Rp. 19.728.332.741.089	4,74%
2008	Rp. 21.446.584.381.751	8,71%
2009	Rp. 22.227.795.281.671	3,64%
2010	Rp. 23.604.458.290.000	6,19%
2011	Rp. 25.736.566.420.000	9,03%
2012	Rp. 27.966.145.830.000	8,66%
2013	Rp. 30.545.257.410.000	9,22%
2014	Rp. 33.293.323.390.000	9,00%
2015	Rp. 35.547.210.570.000	6,77%
2016	Rp. 38.473.771.090.000	8,23%
2017	Rp. 40.407.185.250.000	5,03%

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi (tahun 2003-2017), diolah

Berdasarkan Tabel 4.1, nilai PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2003 sampai 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2017 mencapai 40,41 triliun rupiah. Sektor industri pengolahan berkontribusi 13,99 persen terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017.



Tabel 4.1 menunjukkan bahwa laju PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi selama 15 tahun terakhir. Pada tahun 2004, nilai PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat menjadi 15,41 miliar rupiah dari 14,31 miliar rupiah pada tahun 2003. Namun, laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004 menurun 1,45 persen dari 7,75 persen pada tahun 2003 menjadi 6,21 persen pada tahun 2004.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan naik pada tahun 2005 yaitu sebesar 7,30 persen. Adapun pertumbuhan positif pada tahun 2005 disebabkan oleh meningkatnya produksi industri kertas dan barang cetakan serta tekstil, barang kulit dan alas kaki. Pada tahun 2006, sektor industri pengolahan tumbuh melambat yaitu sebesar 7,22 persen. Pertumbuhan negatif masih terjadi pada tahun 2007. Perlambatan pada tahun 2007 lebih disebabkan oleh produksi industri semen yang peningkatannya lebih lambat dibanding peningkatan produksi semen pada tahun 2006.

Pada tahun 2008, laju PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 3,97 persen dari 4,74 persen pada tahun 2007 menjadi 8,71 persen pada tahun 2008. Perlambatan pertumbuhan sektor ini diperkirakan disebabkan oleh menurunnya produktifitas industri pengolahan makanan-minuman yang relatif tinggi. Menurunnya produktifitas pada industri pengolahan makanan-minuman diperkirakan karena faktor eksternal, yaitu terutama karena tingginya harga bahan baku impor di pasar internasional (misal gandum)

dan di sisi lain nilai tukar Rupiah melemah dibanding US Dollar. Kondisi ini yang menyebabkan volume impor bahan baku mengalami penurunan.



Laju PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan drastis pada tahun 2009. Pertumbuhan negatif yang mencapai angka 3,64 persen merupakan yang terendah selama 15 tahun terakhir. Penyebab dari menurunnya laju PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan oleh kondisi perekonomian global yang masih bergejolak. Walaupun begitu, di akhir pada triwulan IV 2009, kinerja sektor industri pengolahan masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.

Perbaikan kinerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan tercermin pada tahun 2010. Laju PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2010 meningkat menjadi 6,19 persen. Peningkatan pertumbuhan tersebut dikarenakan terdapat realisasi proyek-proyek pemerintah dan swasta mendekati akhir tahun anggaran 2010. Pada tahun 2011, laju PDRB sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan naik 3,16 persen menjadi 9,03 persen. Peningkatan pertumbuhan tersebut didorong oleh kinerja sub-sektor industri semen dan industri tepung terigu. Penurunan kinerja sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan kembali terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,66 persen. Pertumbuhan negatif disebabkan oleh aktivitas produksi tepung terigu yang relatif menurun dan trend pertumbuhan produksi semen cenderung melambat dalam level yang tinggi.

Laju PDRB sektor industri pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan tertinggi dari tahun 2003 sampai 2017 tercatat pada tahun 2013. Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai 9,22 persen. Pertumbuhan dipacu oleh akselerasi kinerja sub-sektor industri tambang. Pada tahun 2014 sampai 2015, kinerja



sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan masing-masing sebesar 9,00 persen dan 6,77 persen.

Pada tahun 2016 laju PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan kembali membaik dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,23 persen. Pertumbuhan positif pada tahun 2016 dipicu oleh peningkatan ekspor komoditas hasil industri pengolahan. Peningkatan terjadi pada ekspor komoditas nikel, tekstil, buah atau sayuran olahan, semen, meubel, dan kulit dan barang dari kulit.

Pada tahun 2017 nilai PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 40,41 miliar rupiah. Nilai PDRB pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi selama 15 tahun terakhir.

4.1.2. Perkembangan Variabel Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4.2 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 – 2017

Tahun	Tenaga Kerja	Laju Pertumbuhah
2003	257.753	-
2004	265.136	2,86%
2005	238.329	-10,11%
2006	232.885	-2,28%
2007	237.589	2,02%
2008	234.205	-1,42%
2009	222.568	-4,97%
2010	216.669	-2,65%
2011	220.246	1,65%
2012	225.880	2,56%
2013	213.807	-5,34%
2014	231.974	8,50%
2015	230.459	-0,65%
2016	282.754	22,69%
2017	263.325	-6,87%

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS),diolah



Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Sulawesi Selatan secara umum tidak mengalami peningkatan yang berarti dari tahun ketahun. Pada tahun 2003 ke tahun 2004, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar 2,86%. Dari 257.753 orang tenaga kerja menjadi 265.136 orang tenaga kerja.

Pada tahun 2005 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 10,11%, 265.136 orang tenaga kerja menjadi 238.329 orang tenaga kerja. Pada tahun 2006 terlihat terjadi kembali penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 232.885 orang tenaga kerja namun meningkat di tahun 2007 menjadi 237.589 orang tenaga kerja.

Pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 2009 kembali terjadi penurunan sebesar 4,97%. Penurunan tersebut kembali terjadi di tahun 2010 sebesar 2,65%.

Pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan. Dari 216.669 orang tenaga kerja pada tahun 2010 meningkat menjadi 220.246 orang tenaga kerja. Peningkatan juga terjadi pada tahun berikutnya di tahun 2012 menjadi 225.880 orang tenaga kerja

Pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 5,34%, hal ini dipicu oleh langkah sejumlah perusahaan yang melakukan efisiensi melalui penundaan perekrutan tenaga kerja lantaran kondisi perekonomian yang belum stabil. Namun kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 231.974 orang tenaga kerja.

Pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan dari 231.974 orang tenaga kerja menjadi 230.459 orang tenaga kerja. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 dari 230.459 orang tenaga kerja bertambah 52.295 orang tenaga kerja menjadi

orang tenaga kerja. Namun kembali terjadi penurunan pada tahun 2017
6,87%



Dari table diatas dapat dilihat bahwa bahwa semenjak tahun 2003 sampai tahun 2017 penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Sulawesi Selatan hanya berkisar di angka 200 ribu orang tenaga kerja saja, walaupun hampir mendekati angka 300 ribu orang tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena industri pengolahan di Sulawesi Selatan kebanyakan bersifat padat modal. Dimana pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh banyak tenaga kerja digantikan oleh mesin-mesin.Selain itu, sebagian besar penduduk di Sulawesi Selatan masih berkecimpung di sektor pertanian.

4.1.3 Perkembangan Variabel Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan

Investasi Swasta bagi pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat penting guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi, karena jika hanya dengan mengandalkan investasi pemerintah Dalam bentuk pengeluaran saja untuk melaksanakan pembangunan tanpa investasi swasta maka pembangunan akan sulit dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi dapat berkembang, dengan adanya 55 pertambahan faktor-faktor produksi terutama penambahan faktor-faktor produksi dan perbaikan faktor produksi tersebut. Penambahan faktor-faktor produksi tersebut dapat melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



**Tabel 4.3 Investasi Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2003-2017**

Tahun	Investasi	Laju Pertumbuhan
2003	Rp. 745.958.700.000	-
2004	Rp. 580.721.760.000	-22,15%
2005	Rp. 907.640.000.000	56,30%
2006	Rp. 155.520.000.000	-82,87%
2007	Rp. 629.230.680.000	304,60%
2008	Rp. 920.093.512.000	46,23%
2009	Rp. 515.251.347.200	-44,00%
2010	Rp. 958.923.459.000	86,11%
2011	Rp. 278.873.070.700	-70,92%
2012	Rp. 2.507.984.630.000	799,33%
2013	Rp. 1.913.456.460.000	-23,71%
2014	Rp. 3.796.517.000.000	98,41%
2015	Rp. 2.506.598.600.000	-33,98%
2016	Rp. 4.063.816.600.000	62,12%
2017	Rp. 4.294.636.000.000	5,68%

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS),diolah

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas, realisasi total investasi pada sektor industri manufaktur di Sulawesi Selatan berfluktuasi. Investasi pada tahun 2006 merupakan total investasi terkecil selama periode 2003-2017 yaitu hanya sebesar Rp.155.520.000.000 sedangkan pada tahun 2017 merupakan yang terbesar dari total investasi tahun 2006-2015 yaitu sebesar Rp.4.294.636.000.000.

Pada tahun 2003 investasi sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp.745.958.700.000. Pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 22,15%. Hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi yang terjadi. Akan tetapi pada tahun 2005 terjadi peningkatan yaitu menjadi Rp.907.640.000.000. Pada tahun 2006 mengalami penurunan cukup besar menjadi Rp.155.520.000.000. Hal ini disebabkan menurunnya penanaman modal asing dimana para investor menekan

investasinya dikarenakan efek dari krisis global dimana kenaikan BBM di tahun 2005.



Pada tahun 2007 investasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp.629.230.680.000. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2008 sebesar 46,23%. Namun menurun pada tahun 2009 sebesar 44,00% mengalami penurunan mengingat kondisi perekonomian global yang mengalami krisis yang berimbas pada perekonomian dalam negeri. Kemudian tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 86,11%.

Pada tahun 2011 investasi mengalami penurunan menjadi Rp.278.873.070.700. Hal ini disebabkan belum stabilnya perekonomian dalam negeri diakibatkan pasca krisis global. Namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya di tahun 2012 menjadi Rp.2.507.984.630.000 dikarenakan meningkat pesatnya jumlah penanaman modal asing. Namun menurun di tahun 2013 menjadi Rp.1.913.456.460.000.

Pada tahun 2014 total investasi sebesar Rp.3.796.517.000.000. Kemudian menurun di tahun 2015 sebesar 33,98%. Namun kembali meningkat menjadi sebesar 62,12% di tahun 2016. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan penanaman modal asing dan peningkatan investasi khususnya pada industri makanan kemudian tren positif kembali terjadi di tahun 2017 dimana investasi sebesar Rp.4.294.636.000.000.



4.1.4 Perkembangan Variabel UMP di Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4.4 Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2017

Tahun	UMP	Laju Pertumbuhan
2003	Rp. 415.000	-
2004	Rp. 455.000	9,64%
2005	Rp. 510.000	12,09%
2006	Rp. 612.000	20,00%
2007	Rp. 673.200	10,00%
2008	Rp. 740.520	10,00%
2009	Rp. 905.000	22,21%
2010	Rp. 1.000.000	10,50%
2011	Rp. 1.100.000	10,00%
2012	Rp. 1.200.000	9,09%
2013	Rp. 1.440.000	20,00%
2014	Rp. 1.800.000	25,00%
2015	Rp. 2.000.000	11,11%
2016	Rp. 2.250.000	12,50%
2017	Rp. 2.500.000	11,11%

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan perkembangan upah dari tahun 2003-2017 di Provinsi Sulawesi Selatan. Setiap tahun Provinsi Sulawesi Selatan menaikkan upah minimum provinsi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian wilayah di Sulawesi Selatan. Hal ini disesuaikan menurut Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahandan berlaku selama 1 tahun 59 berjalan. Secara umum upah minimum provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2003 sebesar Rp. 415.000 ribu kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi Rp. 2.500.000.



4.1.5 Perkembangan Variabel Belanja Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4.5 Belanja Pemerintah Sektor Industri Pengolahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2017

Tahun	Belanja Pemerintah	Laju Pertumbuhan
2003	Rp. 84.824.872.000	-
2004	Rp. 97.970.690.000	15,50%
2005	Rp. 205.725.591.000	109,99%
2006	Rp. 315.605.490.000	53,41%
2007	Rp. 321.084.680.000	1,74%
2008	Rp. 275.180.935.000	-14,30%
2009	Rp. 295.862.668.000	7,52%
2010	Rp. 303.648.224.000	2,63%
2011	Rp. 467.685.317.000	54,02%
2012	Rp. 377.151.913.000	-19,36%
2013	Rp. 490.213.949.000	29,98%
2014	Rp. 676.237.209.000	37,95%
2015	Rp. 849.305.058.000	25,59%
2016	Rp. 856.863.744.000	0,89%
2017	Rp. 1.051.187.331.000	22,68%

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS),diolah

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa belanja pemerintah terlihat cenderung meningkat dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2008 dan 2012. Dapat dilihat pada tahun 2003 Rp. 84.824.872.000 terus meningkat hingga tahun 2007 menjadi Rp. 321.084.680.000 namun menurun pada tahun 2008 sebesar 14,30% tersebut terjadi akibat efek krisis perekonomian global yang berimbas pada perekonomian nasional.

Pada tahun 2009 belanja pemerintah sebesar Rp. 295.862.668.000 dan meningkat hingga tahun 2011 menjadi Rp.467.685.317.000 namun mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 19,36% penurunan tersebut kurang lebih disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi tahun 2012.

ad tahun 2013 belanja pemerintah sebesar Rp.490.213.949.000 kemudian
at pada tahun 2014 sebesar 37,95% peningkatan belanja pemerintah terus



terjadi hingga tahun 2017 mencapai triliun sebesar Rp.1.051.187.331.000. Peningkatan belanja pemerintah merupakan usaha pemerintah meningkatkan produktivitas di sektor industri pengolahan berupa belanja modal atau bias disebut investasi oleh pemerintah.

4.2 Hasil Estimasi Struktural Variabel

Analisis regresi linear secara simultan digunakan untuk mengestimasi besaran pengaruh langsung (Investasi, UMP dan Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja) maupun tidak langsung (Investasi, UMP dan Belanja Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui PDRB).

Adapun hasil estimasi dengan menggunakan analisis regresi secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Hasil Estimasi Fungsi PDRB(Y_1) dan Penyerapan Tenaga Kerja (Y_2)

Arah Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Regresi	t-Statistic	Probability
$\text{Ln}X_1 \rightarrow \text{Ln} Y_1$	0,022	3,973	0,000
$\text{Ln}X_2 \rightarrow \text{Ln} Y_1$	0,466	49,690	0,000
$\text{Ln}X_3 \rightarrow \text{Ln} Y_1$	0,033	4,401	0,000
$\text{Ln}Y_1 \rightarrow \text{Ln} Y_2$	0,764	0,806	0,420
$\text{Ln}X_1 \rightarrow \text{Ln} Y_2$	0,029	1,028	0,304
$\text{Ln}X_2 \rightarrow \text{Ln} Y_2$	-0,393	-0,887	0,375
$\text{Ln}X_3 \rightarrow \text{Ln} Y_2$	-0,764	-1,051	0,293

*)Signifikansi pada $\alpha = 5\%$; $R^2 Y_1 = 0,994$ $Y_2 = 0,360$.

Keterangan: Hasil Estimasi Menggunakan Program AMOS 23

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai R^2 PDRB yaitu sebesar 0,994.

99,4 persen variasi perubahan PDRB dapat dijelaskan oleh variasi



perubahan Investasi, UMP dan Belanja Pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 0,6 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pada pengamatan hasil estimasi fungsi PDRB, variabel yang menunjukkan pengaruh yang signifikan adalah variabel investasi, UMP dan belanja pemerintah dengan tingkat signifikansi 5 persen dan persamaan berdasarkan hasil estimasi Tabel 4.6 dan Persamaan sebagai berikut:

$$\ln Y_1 = \ln 22,915 + 0,022 \ln X_1 + 0,466 \ln X_2 + 0,033 \ln X_3 \dots\dots\dots(4.1)$$

Selanjutnya nilai R square y_2 ($R^2 y_2$) yang dapat dilihat pada Tabel 4.6, yakni sebesar 0,360. Memberikan kesimpulan bahwa 36 persen variasi perubahan pada variabel penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan secara simultan oleh variasi perubahan variabel-variabel investasi, UMP, belanja pemerintah dan PDRB. Sisanya sebesar 64 persen ditentukan oleh variabel atau faktor lainnya diluar model.

Pada pengamatan hasil estimasi fungsi penyerapan tenaga kerja, variabel yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan adalah variabel investasi, UMP, belanja pemerintah dan PDRB. Persamaan berdasarkan hasil estimasi Tabel 4.6 dan Persamaan sebagai berikut:

$$\ln Y_2 = \ln -5,425 + 0,029 \ln X_1 - 0,393 \ln X_2 - 0,043 X_3 + 0,764 \ln Y_1 \dots\dots\dots(4.2)$$

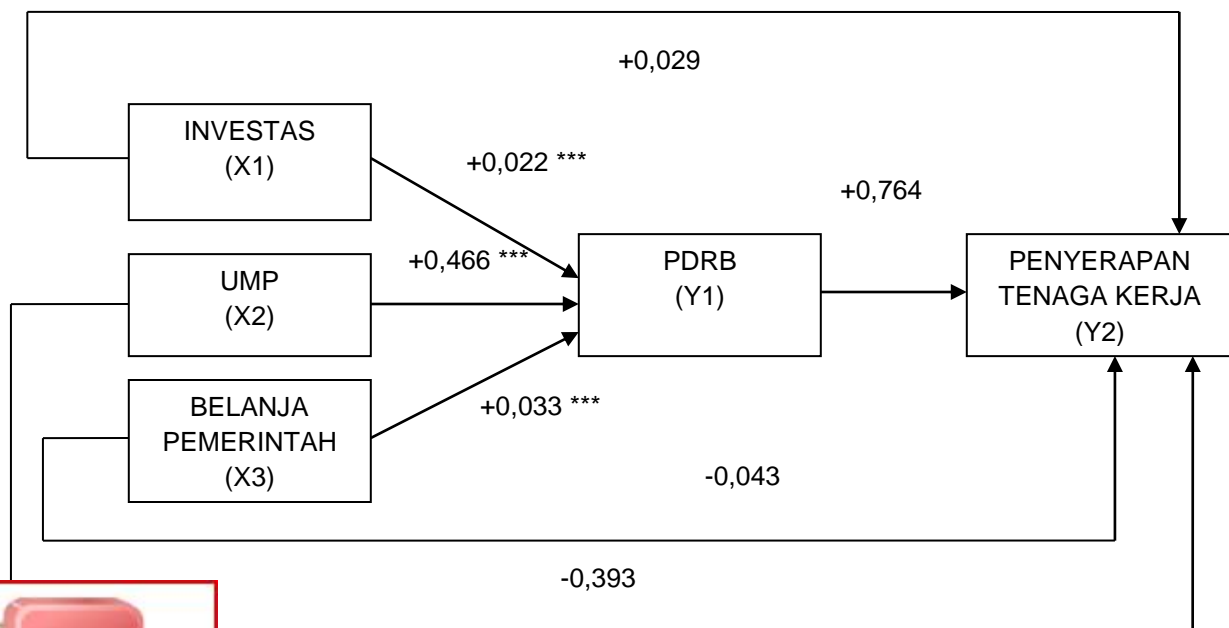
Selanjutnya, untuk mengetahui hasil estimasi besarnya pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan total pengaruh (total effect) dari masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.7 sesuai dengan hipotesis yang dipaparkan sebelumnya.



Tabel 4.7 Besaran pengaruh langsung, tidak langsung dan total pengaruh

Arah Pengaruh Antar Variabel	Angka Koefisien Estimasi		
	Langsung	Tidak Langsung	Total Pengaruh
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,029	-	0,046
melalui Y_1	-	0,017	-
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,022	-	0,022
$X_2 \rightarrow Y_2$	-0,393		-0,037
melalui Y_1		0,356	
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,466		0,466
$X_3 \rightarrow Y_2$	-0,043		-0,018
melalui Y_1		0,025	
$X_3 \rightarrow Y_1$	0,033		0,033
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,764		0,764

Berdasarkan Tabel 4.7, hasil estimasi dapat juga disajikan dalam bentuk gambar seperti yang tampak pada **Gambar 4.1. Hasil Estimasi**



nifikan pada level $\alpha = 1\%$



Penjelasan secara rinci tentang bentuk dan besaran pengaruh langsung (*direct effect*), pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dan total pengaruh (*total effect*) dari investasi, UMP, belanja pemerintah, PDRB dan penyerapan tenaga kerja yang terdapat pada Tabel 4.7 dan gambar 4.1. Analisis dilakukan sesuai dengan urutan hipotesis yang telah di kemukakan sebelumnya.

Pengaruh langsung investasi terhadap penyerapan tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Pengaruh tidak signifikan tersebut menunjukkan perubahan nilai investasi tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini berbeda dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh tidak langsung investasi terhadap penyerapan tenaga kerja melalui PDRB menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Pengaruh investasi terhadap PDRB menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai koefisien 0,022. Hal ini berarti setiap 1 persen kenaikan investasi akan meningkatkan PDRB sebesar 0,022 persen. Walaupun begitu, pengaruh tidak signifikan berasal dari pengaruh tidak signifikan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja yang kemudian secara keseluruhan tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh langsung UMP terhadap penyerapan tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Pengaruh tidak signifikan tersebut menunjukkan perubahan nilai UMP tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini berbeda dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa UMP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh tidak langsung UMP terhadap penyerapan tenaga kerja melalui PDRB menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Pengaruh UMP terhadap PDRB



menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai koefisien 0,466. Hal ini berarti setiap 1 persen kenaikan UMP akan meningkatkan PDRB sebesar 0,466 persen. Walaupun begitu, pengaruh tidak signifikan berasal dari pengaruh tidak signifikan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja yang kemudian secara keseluruhan tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh langsung belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Pengaruh tidak signifikan tersebut menunjukkan perubahan belanja pemerintah tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini berbeda dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh tidak langsung belanja pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja melalui PDRB menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Pengaruh belanja pemerintah terhadap PDRB menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai koefisien 0,033. Hal ini berarti setiap 1 persen kenaikan belanja pemerintah akan meningkatkan PDRB sebesar 0,033 persen. Walaupun begitu, pengaruh tidak signifikan berasal dari pengaruh tidak signifikan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja yang kemudian secara keseluruhan tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.



4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil estimasi variabel investasi, UMP, belanja pemerintah dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja, diperoleh temuan sebagai berikut:

4.3.1 Analisis dan Implikasi Pengaruh PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Temuan penelitian menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh dalam menentukan penyerapan tenaga kerja.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori ekonomi yang dikenal istilah Hukum Okun (Okun's Law), yaitu hukum yang dikenalkan oleh Arthur Okun (1962), Mankiw (2006:248) menjelaskan, hukum okun adalah relasi negatif antara pengangguran dan GDP. Hukum okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2 persen. Dengan kata lain, PDRB yang pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDRB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Wijaya *et al* (2014), PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Riau. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi hendaknya diarahkan untuk dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Dengan diketahuinya sektor-sektor yang



berpotensi dalam menyerap tenaga kerja, maka pemerintah diharapkan lebih memprioritaskan sektor-sektor yang dominan tanpa mengacuhkan sektor-sektor di luar dominan misalnya melalui program-program pelatihan kerja sesuai dengan minat bakat. Sehingga dapat mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja pada sektor lainnya serta menunjang perekonomian Provinsi Riau.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Listri Purnamawati dan Rifki Khoirudin (2019), PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, sektor industri manufaktur merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian. Dengan meningkatkan sektor tersebut maka akan mendorong dan memacu sektor-sektor ekonomi yang lain sehingga dapat meningkatkan output, pada akhirnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat meningkat serta jumlah pengangguran akan berkurang.

4.3.2 Analisis dan Implikasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB, investasi tidak berpengaruh dalam menentukan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar (1998) yang menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan tenaga kerja tetapi juga dapat memperbesar kapasitas produksi. Karena adanya investasi maka ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja



karena investasi yang banyak akan mampu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja. Namun teori Baran (1989), menyatakan bahwa investasi yang masuk ke suatu Negara lebih berorientasi pada padat modal dibandingkan dengan padat karya, sehingga menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam suatu Negara mengalami penurunan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudi Sofia Sandika *et al* (2013), bahwa investasi tidak signifikan terhadap penyerapan kerja di Kabupaten Pelalawan dari tahun 2003-2012. Oleh sebab itu, investasi sebaiknya diarahkan pada industri padat karya mengingat banyaknya tenaga kerja yang seharusnya bisa diserap. Investasi seharusnya tidak hanya diarahkan pada industri padat modal yang lebih banyak menggunakan investasinya untuk membeli mesin-mesin yang membuat tenaga kerja digantikan fungsinya oleh mesin.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Tahir (2018), yang menyatakan bahwa investasi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan 2012-2017. Tidak adanya pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dikarenakan para pemilik usaha dalam menggunakan investasinya lebih cenderung untuk melakukan pembelian barang modal dalam bentuk mesin-mesin sebagai pendukung proses produksi perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produksi dan meningkatkan produktivitas dari barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien, akibat penggunaan mesin tersebut maka penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.



4.3.3 Analisis dan Implikasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung UMP Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB, UMP tidak berpengaruh dalam menentukan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori klasik yang menyatakan bahwa UMP memiliki hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu semakin tinggi UMP maka semakin rendah penyerapan tenaga kerja. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Todaro (2000) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja hal ini akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Pendapat ini pula didukung oleh Sumarsono (2003) bahwa besar kecilnya upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang tinggi akan meningkatkan harga produk yang pada akhirnya membuat permintaan terhadap barang berkurang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ziyadaturrofiqoh *et al* (2018), yang menyatakan bahwa Upah tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi 1997-2015. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengatasi masalah pengupahan dan juga hendaknya kebijakan pengupahan diharapkan mampu meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi serta dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga, kebijakan

akan berorientasi kepada kepentingan seluruh pihak.



Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Budiarto dan Made Heny Urmila Dewi (2015). Penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum provinsi secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan upah minimum provinsi setiap tahunnya tidak banyak mempengaruhi dalam permintaan tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran. Jadi, naiknya upah minimum dapat menekan jumlah pengangguran. Ketika upah minimum meningkat maka dorongan seseorang untuk mencari pekerjaan semakin tinggi dan menyebabkan supply of labor meningkat. Dengan meningkatnya penawaran tenaga kerja akan mendorong pengurangan jumlah pengangguran. Meskipun upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerintah harus tetap bijaksana dalam menentukan upah minimum pada tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut untuk menjaga agar kondisi pasar tenaga kerja tetap pada stabilitas yang baik.

4.3.4 Analisis dan Implikasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Belanja Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB, Belanja Pemerintah tidak berpengaruh dalam menentukan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori Wagner yang menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap

menurutnya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita
at, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat. Dan apabila



belanja pemerintah mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pula penyerapan tenaga kerja pada suatu sektor atau perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ziyadaturrofiqoh, et al (2018), yang menyatakan bahwa belanja pemerintah tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi 1997-2015. Pemerintah sebaiknya Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah dari penggunaan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pemerintah harus lebih bijaksana dalam memprioritaskan pembangunan, terutama untuk dapat memberikan sarana dan prasana seperti pembangunan jalan serta pengembangan SDM yang lebih merata . Agar dapat lebih memperluas lapangan kerja, Pemerintah harus lebih tajam dalam pengalokasian pengeluarannya untuk sektor-sektor ekonomi yang masih potensial ,dan pengeluaran pemerintah hendaknya lebih dioptimalkan untuk biaya pembangunan serta menciptakan produktifitas yang dapat menyerap tenaga kerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Priambodo (2014), yang menyatakan bahwa belanja pemerintah tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah 2008-2013. Alokasi anggaran untuk belanja modal sebaiknya lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan jalan ke daerah produksi atau penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat memberikan dampak multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan atau kursus-kursus keterampilan guna peningkatan kualitas tenaga kerja.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil estimasi pengaruh investasi, UMP dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB, dikarenakan investasi lebih diarahkan kepada industri yang padat modal ketimbang industri padat karya.
2. Hasil estimasi menunjukkan bahwa UMP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB, dikarenakan ketetapan upah belum mampu mendorong angkatan kerja untuk terjun ke dunia kerja.
3. Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB, dikarenakan belanja pemerintah lebih diarahkan kepada industri yang padat modal ketimbang industri padat karya.

5.2 Saran

1. Investasi dari pihak swasta sebaiknya diarahkan pada industri padat karya mengingat banyaknya tenaga kerja yang seharusnya bisa diserap. Investasi seharusnya tidak hanya diarahkan pada industri padat modal yang lebih banyak menggunakan investasinya untuk membeli mesin-mesin yang membuat tenaga kerja digantikan fungsinya oleh mesin.



2. Pemerintah hendaknya mengarahkan kebijakan pengupahan agar mampu meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi serta dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja. Disisi lain, masyarakat hendaknya tetap mempertimbangkan upah minimum yang ditetapkan sebagai faktor pendorong untuk terjun ke dunia kerja.
3. Pemerintah seharusnya meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah dalam penggunaan belanja modal dengan mengarahkan penggunaan belanja modal kepada industri yang berbasis padat karya agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal.
4. Bagi studi serupa selanjutnya, hendaknya penulis berikutnya menggunakan variable lain yang lebih mampu berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan.



DAFTAR PUSTAKA

Alhiriani. 2003. *Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.

Arif dan heny. 2015. *Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Mediasi Investasi di Provinsi Bali*. E-Jurnal ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.4, No.10 Oktober 2015.

Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN: Yogyakarta.

Askenazy, Philippe. 2003. Minimum Wage, Export, and Growth. *European Economic Review* 47 (2003), pp 114 – 167.

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Dalam Angka in Figures, 2015.

Bodie, dkk. 2008. *Investments Investasi*. Jakarta: Edisi Keenam. Salemba Empat.

Budiarto, Arif dan Made Heny Urmila Dewi “*Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja melalui mediasi Investasi di Provinsi Bali*.” E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol.4 No.10, Oktober 2015, p.1219-1246.

Danawati¹, Sri, dkk, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. Jurnal. Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Dina dan Rifki. 2019. *Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Manufaktur di Jawa Tengah* 2011-2015. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 1.

1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.



- Gilarso. 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Halim, Abdul. 2005. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko, Hani. 1985. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.*, Liberty, Yogyakarta.
- Harijono, Gatot Setio. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006- 2010*, Jurnal. Bali: Universitas Udayana.
- Jhingan, L. M. 2000. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jumriadi. 2010. *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Upah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan Periode 1999-2008*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Dipublikasikan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Ketiga.*, AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mankiw N, Gregory, dkk. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mangkoesoebroto, Guripno. 2013. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga: Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Manululang, Sendjun.1998. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Marshafeni, Ovilla., Alexandi, F. Muhammad., 2013: *Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian dan Sektor Jasa Pasca Kebijakan Upah Minimum di Provinsi Banten (Periode Tahun 2001-2011)*, Jurnal Manajemen & Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, Volume 10, Nomor 2., 1-80.



Mulyadi. 2000. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pratomo. 2011. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Surakarta Tahun 2000- 2008. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.

Priambodo, Agung. 2014. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012*. Economics Development Analysis Journal 3 (3) (2014).

Rudi et al. 2014. *Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Pelalawan*. JOM FEKON 1. NO. 2OKTOBER 2014.

Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia* , Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.

Sadono, Sukirno. 1995. Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Edisi kedua. Jakarta : PT. Karya Grafindo Persada.

Sumarsono, Sony. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suroto, 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Tahir, Kurnia. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Investasi, Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan*. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah (2018) 1 (2), 110-132.

Muhammad. 2010. *Ekonomi Industri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* Trans Haris Munandar.



Jakarta: Erlangga.

Wahyuni, Ayu Putri, Sukarsa dan Yuliarmin.2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.8:458-477.

Waisgrais, Sebastian, 2003. Wage Inequality and the Labor Market in Argentina: *Labor Institutions, Supply, and Demand in the Period 1980-99*. *International Institute for Labor Studies Discussion Paper*.DP/146/2003 pp 1-53, Decent Work Research Programme.

Wicaksono, Reza. 2013. *Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia Tahun 1990- 2008*, Jurnal. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Wignjosoebroto, Sritomo. 2003. *Pengantar Teknik & Manajemen Industri*. Jakarta: Guna Widya.

Wijaya, Andi. 2014. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau*. Jom FEKON Vol. 1 No. 2.

Yani, Ahmad. 2011. *Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan Periode 2000-2009*. Skripsi, Universitas Hasanuddin. Tidak Dipublikasikan.

Zamrowi, M Taufik. 2007. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil (Studi di Industri Kecil Mebel di Kota Semarang)*. [Tesis]. Universitas

negoro.



Ziyadaturrofiqoh *et al.* 2018. *Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi.* e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 7. No.1, Januari – April 2018.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Data yang digunakan

Data penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan.

Tahun	Tenaga Kerja	Ln Tenaga Kerja
2003	257.753	12,46
2004	265.136	12,49
2005	238.329	12,38
2006	232.885	12,36
2007	237.589	12,38
2008	234.205	12,36
2009	222.568	12,31
2010	216.669	12,29
2011	220.246	12,30
2012	225.880	12,33
2013	213.807	12,27
2014	231.974	12,35
2015	230.459	12,35
2016	282.754	12,55
2017	263.325	12,48



Data PDRB Sektor industri pengolahan.

Tahun	PDRB	Ln PDRB
2003	Rp. 15.414.955.874.762	30,37
2004	Rp. 16.372.579.211.901	30,43
2005	Rp. 17.567.125.757.966	30,50
2006	Rp. 18.835.343.567.256	30,57
2007	Rp. 19.728.332.741.089	30,61
2008	Rp. 21.446.584.381.751	30,70
2009	Rp. 22.227.795.281.671	30,73
2010	Rp. 23.604.458.290.000	30,79
2011	Rp. 25.736.566.420.000	30,88
2012	Rp. 27.966.145.830.000	30,96
2013	Rp. 30.545.257.410.000	31,05
2014	Rp. 33.293.323.390.000	31,14
2015	Rp. 35.547.210.570.000	31,20
2016	Rp. 38.473.771.090.000	31,28
2017	Rp. 40.407.185.250.000	31,33



Data Investasi Sektor Industri Pengolahan.

Tahun	Investasi	Ln Investasi
2003	Rp. 745.958.700.000	27,34
2004	Rp. 580.721.760.000	27,09
2005	Rp. 907.640.000.000	27,53
2006	Rp. 155.520.000.000	25,77
2007	Rp. 629.230.680.000	27,17
2008	Rp. 920.093.512.000	27,55
2009	Rp. 515.251.347.200	26,97
2010	Rp. 958.923.459.000	27,59
2011	Rp. 278.873.070.700	26,35
2012	Rp. 2.507.984.630.000	28,55
2013	Rp. 1.913.456.460.000	28,28
2014	Rp. 3.796.517.000.000	28,97
2015	Rp. 2.506.598.600.000	28,55
2016	Rp. 4.063.816.600.000	29,03
2017	Rp. 4.294.636.000.000	29,09



Data Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun	UMP	Ln UMP
2003	Rp. 415.000	12,94
2004	Rp. 455.000	13,03
2005	Rp. 510.000	13,14
2006	Rp. 612.000	13,32
2007	Rp. 673.200	13,42
2008	Rp. 740.520	13,52
2009	Rp. 905.000	13,72
2010	Rp. 1.000.000	13,82
2011	Rp. 1.100.000	13,91
2012	Rp. 1.200.000	14,00
2013	Rp. 1.440.000	14,18
2014	Rp. 1.800.000	14,40
2015	Rp. 2.000.000	14,51
2016	Rp. 2.250.000	14,63
2017	Rp. 2.500.000	14,73



Data Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun	Belanja Pemerintah	Ln Belanja Pemerintah
2003	Rp. 84.824.872.000	25,16
2004	Rp. 97.970.690.000	25,31
2005	Rp. 205.725.591.000	26,05
2006	Rp. 315.605.490.000	26,48
2007	Rp. 321.084.680.000	26,49
2008	Rp. 275.180.935.000	26,34
2009	Rp. 295.862.668.000	26,41
2010	Rp. 303.648.224.000	26,44
2011	Rp. 467.685.317.000	26,87
2012	Rp. 377.151.913.000	26,66
2013	Rp. 490.213.949.000	26,92
2014	Rp. 676.237.209.000	27,24
2015	Rp. 849.305.058.000	27,47
2016	Rp. 856.863.744.000	27,48
2017	Rp. 1.051.187.331.000	27,68



Lampiran 2

Output Regresi Menggunakan Aplikasi Amos 23

Variable Summary (Group number 1)

Your model contains the following variables (Group number 1)

Observed, endogenous variables

Y1

Y2

Observed, exogenous variables

X1

X2

X3

Unobserved, exogenous variables

u1

u2

Variable counts (Group number 1)

Number of variables in your model: 7

Number of observed variables: 5

Number of unobserved variables: 2

Number of exogenous variables: 5

Number of endogenous variables: 2

Parameter Summary (Group number 1)

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed	0	0	2	0	0	2
Labeled	0	0	0	0	0	0
Unlabeled	9	0	3	0	0	12
Total	9	0	5	0	0	14

Models

Default model (Default model)

Path Model (Default model)

Number of degrees of freedom (Default model)



Number of distinct sample moments: 15
 Number of distinct parameters to be estimated: 12
 Degrees of freedom (15 - 12): 3

Result (Default model)

Minimum was achieved
 Chi-square = 46,858
 Degrees of freedom = 3
 Probability level = ,000

Group number 1 (Group number 1 - Default model)

Estimates (Group number 1 - Default model)

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Y1 <--- X1	,022	,006	3,973	***	par_1
Y1 <--- X2	,466	,009	49,690	***	par_2
Y1 <--- X3	,033	,008	4,401	***	par_3
Y1 <--- u1	,014	,003	5,292	***	par_8
Y2 <--- X1	,029	,029	1,028	,304	par_4
Y2 <--- X2	-,393	,443	-,887	,375	par_5
Y2 <--- X3	-,043	,041	-1,051	,293	par_6
Y2 <--- Y1	,764	,949	,806	,420	par_7
Y2 <--- u2	,050	,009	5,292	***	par_9

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
Y1 <--- X1	,079
Y1 <--- X2	,990
Y1 <--- X3	,088
Y1 <--- u1	,075
Y2 <--- X1	,321
Y2 <--- X2	-2,525
Y2 <--- X3	-,347
Y2 <--- Y1	2,310
Y2 <--- u2	,800



Variances: (Group number 1 - Default model)

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
u1	2,000				
u2	2,000				
X1	,934	,353	2,646	,008	par_10
X2	,323	,122	2,646	,008	par_11
X3	,499	,189	2,646	,008	par_12

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model)

	Estimate
Y1	,994
Y2	,360

Matrices (Group number 1 - Default model)**Factor Score Weights (Group number 1 - Default model)**

▪

Total Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y1
Y1	,033	,466	,022	,000
Y2	-,018	-,037	,046	,764

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y1
Y1	,088	,990	,079	,000
Y2	-,144	-,237	,503	2,310

Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y1
Y1	,033	,466	,022	,000
Y2	-,043	-,393	,029	,764

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y1
Y1	,088	,990	,079	,000
Y2	-,144	-2,525	,321	2,310



Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y1
Y1	,000	,000	,000	,000
Y2	,025	,356	,017	,000

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)

	X3	X2	X1	Y1
Y1	,000	,000	,000	,000
Y2	,203	2,288	,183	,000

Minimization History (Default model)

Iteration	Negative eigenvalues	Condition #	Smallest eigenvalue	Diameter	F	NTries	Ratio
0	e	1	-36,604	9999,000	1130,886	0	9999,000
1	e	1	-9,259	,350	465,754	9	1,055
2	e	1	-,860	,142	255,870	5	1,166
3	e	0	90244,495	,490	140,335	9	1,123
4	e	0	128018,347	1,873	85,469	1	1,245
5	e	0	120385,804	,980	61,490	1	1,282
6	e	0	153140,421	,609	51,331	1	1,268
7	e	0	220364,918	,375	47,748	1	1,233
8	e	0	275622,785	,194	46,931	1	1,165
9	e	0	299412,469	,061	46,859	1	1,070
10	e	0	299309,214	,006	46,858	1	1,009
	e	0	309623,048	,000	46,858	1	1,000



Pairwise Parameter Comparisons (Default model)

Variance-covariance Matrix of Estimates (Default model)

	par _1	par _2	par _3	par _4	par _5	par _6	par _7	par _8	par _9	par _10	par _11	par _12
par _1	,00 0											
par _2	,00 0	,00 0										
par _3	,00 0	,00 0	,00 0									
par _4	,00 0	,00 0	,00 0	,00 1								
par _5	,00 0	,00 0	,00 0	,00 9	,19 6							
par _6	,00 0	,00 0	,00 0	,00 1	,01 4	,00 2						
par _7	,00 0	,00 0	,00 0	,02 0	,41 9	,03 0	,90 0					
par _8	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0				
par _9	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0			
par _10	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,125		
par _11	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,000	,015	
par _12	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,00 0	,000	,000	,036

Correlations of Estimates (Default model)

	par _1	par _2	par _3	par _4	par _5	par _6	par _7	par _8	par _9	par _10	par _11	par _12
par _1	1,0 00											
par _2	,00 0	1,0 00										
par _3	,00 0	,00 0	1,0 00									
par _4	,00 0	,00 0	,00 0	1,0 00								
par _5	,00 0	,00 0	,00 0	,72	1,0							



	par _1	par _2	par _3	par _4	par _5	par _6	par _7	par _8	par _9	par _10	par _11	par _12
_5	0	0	0	6	00							
par _6	,00	,00	,00	,55	,76	1,0						
	0	0	0	5	0	00						
par _7	,00	,00	,00	-	-	-	1,0					
	0	0	0	,72	,99	,76	00					
				8	7	2						
par _8	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,0				
	0	0	0	0	0	0	0	00				
par _9	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	00			
par _10	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,00		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
par _11	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1,00	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,000	0	
par _12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,000	1,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,000	,000	0

Miscellaneous

Model Fit Summary

CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	12	46,858	3	,000	15,619
Saturated model	15	,000	0		
Independence model	5	126,267	10	,000	12,627

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	,191	,583	-1,083	,117
Saturated model	,000	1,000		
Independence model	,198	,366	,049	,244

Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	,629	-,237	,644	-,257	,623
Saturated model	1,000		1,000		1,000
Independence model	,000	,000	,000	,000	,000



Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	,300	,189	,187
Saturated model	,000	,000	,000
Independence model	1,000	,000	,000

NCP

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	43,858	25,300	69,852
Saturated model	,000	,000	,000
Independence model	116,267	83,693	156,293

FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	3,347	3,133	1,807	4,989
Saturated model	,000	,000	,000	,000
Independence model	9,019	8,305	5,978	11,164

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	1,022	,776	1,290	,000
Independence model	,911	,773	1,057	,000

AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	70,858	88,858	79,355	91,355
Saturated model	30,000	52,500	40,621	55,621
Independence model	136,267	143,767	139,807	144,807

ECVI

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	5,061	3,736	6,918	6,347
Saturated model	2,143	2,143	2,143	3,750
Independence model	9,733	7,407	12,592	10,269



HOELTER

Model	HOELTER .05	HOELTER .01
Default model	3	4
Independence model	3	3

Execution time summary

Minimization: ,031
Miscellaneous: 1,563
Bootstrap: ,000
Total: 1,594



Lampiran 3

Uji Multikolinearitas

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Y1, X1, X3, X2 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y2

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,428 ^a	,183	-,143	,08756

a. Predictors: (Constant), Y1, X1, X3, X2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,017	4	,004	,562	,696 ^b
	Residual	,077	10	,008		
	Total	,094	14			

a. Dependent Variable: Y2

b. Predictors: (Constant), Y1, X1, X3, X2



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance
1	(Constant)	-9,289	24,807		-,374	,716	
	X1	,015	,039	,206	,382	,710	,280
	X2	-,449	,543	-3,221	-,826	,428	,005
	X3	-,065	,111	-,583	-,589	,569	,083
	Y1	,947	1,070	3,626	,884	,397	,005

ent Variable: Y2



Coefficient Correlations^a

Model			Y1	X1	X3	X2
1	Correlations	Y1	1,000	-,418	-,209	-,954
		X1	-,418	1,000	,489	,216
		X3	-,209	,489	1,000	-,071
		X2	-,954	,216	-,071	1,000
	Covariances	Y1	1,146	-,018	-,025	-,555
		X1	-,018	,002	,002	,005
		X3	-,025	,002	,012	-,004
		X2	-,555	,005	-,004	,295

a. Dependent Variable: Y2

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	X1	X2	X3	Y1
1	1	4,998	1,000	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,001	66,471	,00	,08	,00	,00	,00
	3	,001	98,657	,00	,48	,00	,02	,00
	4	3,750E-5	365,087	,00	,28	,07	,94	,00
	5	2,910E-7	4144,100	1,00	,16	,92	,03	1,00

a. Dependent Variable: Y2

Ket : Terdapat gejala multikolinearitas apabila:

1. Nilai Tol >0,1
2. Nilai FIV < 10



Lampiran 4

Biodata

BIODATA



Identitas Diri

Nama : Muhammad Maulid
 Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 17 Juli 1997
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat Rumah : BTN PALU CIPTA D 09 MAROS
 Telepon Rumah atau HP : 081345977665
 Alamat E-mail : muhammadmaulid961@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Jenjang	Tahun	Nama Sekolah
SD	2003-2009	SD Negeri 30 Maros
SMP	2009-2012	SMP Negeri 2 Maros
SMA	2012-2015	SMA Negeri 1 Maros
S1	2015-Sekarang	Universitas Hasanuddin, Jursan Ilmu Ekonomi



Prestasi

Prestasi Non Akademik:

Tahun	Prestasi
2017	Juara 1, Lomba Akustik, yang diselenggarakan oleh HMJ Bahasa Inggris-UNM, antar mahasiswa se-Kota Makassar.
2017	Juara 3, Lomba Futsal, yang diselenggarakan oleh HIMAPEM-UH, antar mahasiswa se-Universitas Hasanuddin.
2017	Juara 1, Lomba Akustik, yang diselenggarakan oleh LKM-Universitas Bosowa), antar Mahasiswa se-Kota Makassar.
2017	Juara 3, Lomba Band, PEKAN SENI UNHAS, yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin, antar Mahasiswa se-Universitas Hasanuddin.
2018	Juara 2, Lomba Akustik, yang diselenggarakan oleh HMJ Manajemen-UNM, kategori umum se-Kota Makassar.



Pengalaman Organisasi

Tahun	Jabatan	Nama Organisasi
2017-2018	Anggota Biro Pengembangan Mahasiswa	Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HIMAJIE), Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Hasanuddin.
2017-2018	Anggota Bidang Seni Musik	Kreativitas Seni Ekonomi (KRESEK), Universitas Hasanuddin.
2017-2018	Anggota Divisi Perlengkapan	Ekowowits Futsal Club, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Hasanuddin

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 17 Juli 2019

MUHAMMAD MAULID

